

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bahsan, M. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Malang: Rajawali Press.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Perseroan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- D.Y, Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Fuady, Munir. 2017. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana
- Jenie, Siti Ismijatie dkk. 2019. *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: UMY Press.
- Machmuddin, Dudu Duswara. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Merkokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subagiyo, Dwi Tatak. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2013. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet-19, 1985.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316). *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan *Asas Nebis In Idem*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Lain-Lain

Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Latifiani, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, Jurnal Adhaper, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Vanggy Poli dkk, Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 145Pdt.G2017Pn.Thn), Jurnal Lex Privatum Vol. IX No. 4, April 2021.

Wawancara dengan Bapak Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban.